

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanasan global (*global warming*) adalah salah satu masalah yang sedang diperdebatkan di banyak negara saat ini. Adanya permasalahan yang terjadi seperti bencana alam, perubahan iklim dan masalah lingkungan, serta isu terkait pemanasan global ini tentunya dikarenakan adanya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat meningkatnya aktivitas manusia dan kegiatan industri pada era revolusi industri yang terus berkembang secara linier di seluruh negara. Suhu rata-rata global telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan emisi karbon di seluruh dunia. Menurut *Global Carbon Project*, emisi karbon yang berasal dari bahan bakar fosil akan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023. Setiap negara di dunia memberikan kontribusinya dalam peningkatan emisi karbon termasuk Indonesia. Indonesia adalah penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia, dengan Indonesia menyumbang sekitar 1,80% dari emisi karbon global (Zulfikar, 2024).

Ketika perusahaan melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon bersikap apatis terhadap lingkungan, seperti peningkatan emisi karbon tentu menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup dunia. Hal ini dapat menjadi dasar setiap perusahaan untuk peduli akan dampak negatif yang dihasilkannya salah satunya terkait dengan permasalahan lingkungan. Beberapa negara telah berkomitmen untuk menyetujui perjanjian multilateral tentang perubahan iklim bersama masyarakat global, termasuk Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim dan terlibat dalam upaya global untuk mengurangi emisi GRK. Tindakan protokol negara ini menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap kondisi pembangunan dan lingkungan. Perekonomian tidak hanya tumbuh, tetapi juga perlindungan sosial dan lingkungan. Indonesia juga meratifikasi Protokol Kyoto periode kedua pada 30 September 2014.

Di Indonesia terdapat UU yang mengatur terkait ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982 yang menjelaskan bahwa setiap usaha wajib untuk peduli dan memelihara kelestarian lingkungan hidup yang akan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, juga ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur pengelolaan nilai ekonomi karbon untuk mencapai tujuan kontribusi nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dan pembangunan. Salah satu bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah melakukan pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan. Pemerintah menetapkan kebijakan terkait kewajiban setiap perusahaan publik untuk menerbitkan laporan keberlanjutan yang diatur dalam peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Pemerintah Indonesia telah dan masih berusaha untuk mengembangkan rencana untuk mengurangi emisi karbon. Beberapa perusahaan mendukung upaya ini dengan mengungkapkan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan operasionalnya yang berdampak pada lingkungan. Namun, karena di

Indonesia tidak ada peraturan tetap yang mewajibkan perusahaan harus mengungkapkan emisi karbon, maka tidak semua perusahaan akan mengungkapkan emisi karbon. Dengan adanya komitmen dan peraturan yang dibuat oleh Indonesia, serta dibentuknya kebijakan terkait dengan emisi karbon mendorong perusahaan untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan mengungkapkan emisi karbon pada laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan.

Dalam penyelesaian masalah emisi karbon ini tentu melibatkan banyak pihak termasuk investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. Perusahaan akan selalu diminta untuk mencapai kinerja yang optimal, dan manajemen akan berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Perusahaan sering melakukan apa pun untuk menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif seperti krisis lingkungan dan sosial, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa pihak yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, tetapi ada juga pihak lain yang sangat peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan teori *stakeholder* dan teori legitimasi, perusahaan tidak hanya bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, perusahaan harus bermanfaat bagi investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain, dan harus memiliki tujuan institusi yang sejalan dengan nilai dan standar masyarakat yang berlaku.

Pengungkapan emisi karbon perusahaan dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Profitabilitas adalah komponen pertama yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Tingkat profitabilitas yang konsisten adalah ukuran untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Tingkat risiko yang timbul dari investasi seorang investor akan dikaitkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas rendah harus berkonsentrasi pada tujuan keuangan dan peningkatan kinerja sehingga mereka memiliki kemampuan terbatas untuk mencegah dan melaporkan emisi karbon, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan informasi lingkungan (Luo et al., 2013).

Ukuran perusahaan adalah komponen kedua yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecil suatu entitas, yang dapat dihitung dengan total asetnya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan akan lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial karena perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan biaya yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar juga dinilai mampu mempertahankan reputasi dan citra yang baik, membuat pilihan investasi yang lebih baik, dan mempertahankan loyalitas investor dan pelanggan potensial.

Kepemilikan institusional merupakan komponen ketiga yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Kepemilikan institusional mengacu pada jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lainnya dalam suatu perusahaan. Eksistensi investor institusional dinilai dapat berfungsi sebagai pengendali yang efektif dalam proses pengambilan keputusan manajer. Akibatnya, perusahaan harus selalu memenuhi kebutuhan investor, termasuk pengungkapan emisi karbon.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian terdahulu menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon (Akhiroh & Kiswanto, 2016), tetapi ditemukan juga hasil berbeda yang menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Sekarini & Setiadi, 2021; Suherman & Kurniawati, 2023; Witri Astiti & Wirama, 2020). Selanjutnya, penelitian terdahulu menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan (Sekarini & Setiadi, 2021), tetapi ditemukan juga hasil berbeda yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Witri Astiti & Wirama, 2020). Kemudian, penelitian terdahulu menunjukkan hasil kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon (Angelina & Handoko, 2023), tetapi ditemukan juga hasil berbeda yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Akhiroh & Kiswanto, 2016; Suherman & Kurniawati, 2023).

Adanya komitmen Indonesia terkait dengan penurunan emisi karbon yang kurang diimbangi dengan praktiknya, dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk menggabungkan dan menguji kembali menggunakan beberapa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 karena perusahaan sektor energi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon di Indonesia

bahkan menjadi penyumbang terbesar di tahun 2022, serta melihat sektor energi sangat berkaitan dengan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, juga perusahaan perlu memperhatikan dampak dari emisi karbon yang dihasilkan, serta menentukan apakah tiga variabel independen ini mempengaruhi pengungkapan emisi karbon di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai bukti empiris tentang bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengungkapan emisi karbon. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yang berfokus pada akuntansi keuangan terkait pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membuat kebijakan tentang pengungkapan atau pelaporan emisi karbon dan membantu manajemen memahami informasi tentang pengungkapan emisi karbon saat membuat keputusan. Investor juga diharapkan dapat mempertimbangkan penelitian ini saat membuat keputusan.